

**ANALISIS EFISIENSI BELANJA OPERASIONAL SEBELUM DAN  
SESUDAH PENERAPAN *WORK FROM HOME (WFH)* PADA DINAS  
PUPR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**Dhelvyva Prima Dani**

Program Studi Administrasi Bisnis,  
Universitas Mulawarman  
[dhelvyavya1709@gmail.com](mailto:dhelvyavya1709@gmail.com)

**Mukhibatul Hikmah**

Universitas Mulawarman  
[mukhi@fisip.unmul.ac.id](mailto:mukhi@fisip.unmul.ac.id)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan kebijakan Work from Home (WFH) terhadap efisiensi belanja operasional serta hambatan teknis yang dialami pegawai di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Timur. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, penelitian ini mengkaji bagaimana transisi ruang kerja fisik ke ruang virtual memengaruhi pola konsumsi sumber daya dan kualitas output birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa WFH berhasil menciptakan efisiensi pada pos belanja rutin kantor seperti penurunan tagihan listrik, air, dan alat tulis kantor, serta penghematan biaya transportasi bagi pegawai. Namun, efisiensi tersebut bersifat tidak seimbang dengan efektivitas kerja akibat munculnya 10 hambatan utama, di antaranya ketidaksiapan sistem absensi digital, keterbatasan akses server pangkalan data teknis, hingga kendala administratif dalam prosedur penomoran surat keluar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun pengeluaran kantor menjadi lebih hemat, sebagian biaya kerja berpindah kepada pegawai saat bekerja dari rumah. Selain itu, produktivitas kerja juga mengalami penurunan karena fasilitas dan jaringan digital yang belum memadai. Oleh karena itu, instansi disarankan menerapkan sistem kerja hybrid serta meningkatkan penggunaan teknologi digital agar pelayanan publik di bidang konstruksi dan penataan ruang tetap berjalan dengan baik.

**Kata Kunci:** *Efisiensi Belanja, WFH, Dinas PUPR, Hambatan Teknis, Produktivitas Birokrasi.*

**ABSTRACT**

*Policy at the Department of Public Works and Spatial Planning (PUPR) of East Kalimantan Province. Utilizing a This research aims to analyze the between office operational expenditure efficiency and the technical obstacles experienced by employees in implementing the Work From Home (WFH descriptive qualitative approach with a case study method, this research examines how the transition from physical to virtual workspace affects resource consumption patterns and the quality of bureaucratic output. The results indicate that WFH successfully created efficiency in office routine expenditure items such as reduced electricity, water, and*

*office stationery bills, as well as fuel cost savings for employees. However, this efficiency is contradictory to work effectiveness due to the emergence of 10 primary obstacles, including the unreadiness of digital attendance systems, limited access to technical database servers, and administrative barriers in outgoing mail numbering procedures. This study concludes that while fiscal efficiency was achieved, there was a shift in operational burdens to the employees' domestic sphere and a degradation of productivity due to inadequate digital infrastructure. It is suggested that the department adopt a hybrid work model and strengthen the cloud computing ecosystem to maintain the stability of public services in the construction and spatial planning sectors.*

**Keywords:** *Operational Efficiency, WFH, PUPR Department, Technical Obstacles, Bureaucratic Productivity*

## **A. PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi birokrasi mendorong perubahan sistem kerja pada berbagai instansi pemerintah di Indonesia (Cahyarini & Samsara, 2021). Pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik berkembang seiring tuntutan efektivitas, efisiensi, dan fleksibilitas kerja aparatur sipil negara. Kondisi tersebut mendorong pemerintah menerapkan sistem kerja berbasis teknologi informasi melalui kebijakan *Work From Home* (WFH) (Prasetyo & Sari 2022). Penerapan WFH menunjukkan bahwa pelaksanaan administrasi pemerintahan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kehadiran fisik pegawai di kantor, tetapi lebih menekankan pencapaian target kerja dan pemanfaatan sistem digital dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Perubahan sistem kerja tersebut sejalan dengan kebijakan pengelolaan kinerja aparatur sipil negara yang menekankan hasil kerja, produktivitas, dan kontribusi pegawai sebagai indikator utama penilaian kinerja aparatur pemerintah (Wirasistha & Widowati, 2023).

Penerapan WFH turut memengaruhi tata kelola organisasi dan pola pelaksanaan pekerjaan pada instansi pemerintah. Pelaksanaan pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara langsung di kantor berubah menjadi sistem kerja berbasis komunikasi dan administrasi digital (Prasetyo & Sari, 2022). Penggunaan aplikasi rapat daring, dokumen elektronik, dan sistem administrasi digital menjadi bagian penting dalam mendukung pekerjaan selama penerapan WFH. Perubahan tersebut tidak hanya memengaruhi mekanisme kerja aparatur, tetapi juga berdampak pada penggunaan anggaran operasional instansi. Pengurangan aktivitas kerja di kantor menyebabkan beberapa komponen pengeluaran operasional seperti listrik, air, dan alat tulis kantor mengalami penurunan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan WFH berkaitan dengan upaya efisiensi penggunaan anggaran operasional instansi pemerintah (Sadhana et al., 2023).

Efisiensi belanja operasional menjadi salah satu aspek penting dalam penerapan WFH pada instansi pemerintah. Pengurangan penggunaan fasilitas kantor selama WFH dinilai mampu menekan pengeluaran operasional instansi karena aktivitas kerja di lingkungan kantor menjadi lebih terbatas. Pengeluaran seperti biaya listrik, konsumsi harian kantor, dan kebutuhan administrasi mengalami penurunan dibandingkan sebelum penerapan WFH (Sunardi, 2022).

Akan tetapi, kondisi tersebut juga diikuti dengan meningkatnya pengeluaran pribadi pegawai untuk memenuhi kebutuhan kerja selama bekerja dari rumah. Pegawai harus menyediakan biaya listrik, internet, dan perangkat kerja secara mandiri selama pelaksanaan WFH. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efisiensi pengeluaran pada tingkat instansi belum sepenuhnya menggambarkan efisiensi pelaksanaan kerja secara keseluruhan (Puspitaningtyas & Endrayanto, 2023).

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu instansi pemerintah yang menerapkan sistem kerja WFH dalam pelaksanaan administrasi dan pelayanan teknis. Penerapan WFH pada instansi teknis memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi karena sebagian besar pekerjaan berkaitan dengan pengelolaan dokumen proyek, data teknis infrastruktur, dan administrasi pembangunan. Pelaksanaan pekerjaan tersebut memerlukan dukungan infrastruktur digital dan akses data yang memadai agar pekerjaan dapat berjalan secara efektif (Nugroho, 2024). Pengurangan penggunaan fasilitas kantor selama penerapan WFH memang berpotensi menekan pengeluaran operasional instansi, tetapi berbagai hambatan teknis seperti keterbatasan akses basis data internal, gangguan jaringan internet, dan sistem administrasi digital yang belum optimal turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan pekerjaan pada lingkungan Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas penerapan *Work From Home* (WFH) pada instansi pemerintah dengan fokus penelitian yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan oleh Darmawan dan Atmojo (2020) membahas penerapan kebijakan WFH bagi aparatur sipil negara di Indonesia serta pengaruhnya terhadap pola kerja birokrasi dan pelayanan publik. Penelitian Rahmadani et al. (2022) bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Work From Home* terhadap kinerja pegawai, *work life balance*, dan *work stress* pada instansi pemerintah. Penelitian sebelumnya masih lebih banyak membahas efektivitas kerja dan dampak penerapan WFH terhadap pegawai, sedangkan kajian mengenai efisiensi belanja operasional sebelum dan sesudah penerapan WFH pada instansi teknis pemerintah masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi belanja operasional sebelum dan sesudah penerapan *Work From Home* (WFH) pada Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan sistem kerja yang lebih efektif dan efisien pada instansi pemerintah.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Work From Home (WFH)**

*Work From Home* (WFH) merupakan sistem kerja yang memungkinkan pegawai melaksanakan pekerjaan dari rumah dengan tanggung jawab dan kewajiban yang tetap sama seperti bekerja di kantor. Sistem kerja ini diterapkan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana utama dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan secara jarak jauh. Penerapan WFH mulai banyak digunakan pada instansi pemerintah maupun sektor swasta sejak terjadinya pandemi COVID-19 sebagai upaya untuk meminimalisasi penyebaran virus tanpa menghentikan aktivitas pekerjaan dan pelayanan publik. Pelaksanaan WFH

menuntut pegawai untuk tetap mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai target meskipun tidak berada di lingkungan kantor secara langsung (Napitu et al., 2022).

Penerapan WFH memberikan perubahan terhadap pola kerja organisasi karena pelaksanaan pekerjaan dilakukan melalui sistem digital dan komunikasi daring. Penggunaan aplikasi rapat virtual, sistem administrasi elektronik, serta pengelolaan dokumen digital menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas kerja selama penerapan WFH. Sistem kerja tersebut dinilai mampu memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan pekerjaan dan membantu menjaga keberlangsungan pelayanan publik pada kondisi tertentu. Akan tetapi, penerapan WFH juga menimbulkan berbagai tantangan seperti keterbatasan fasilitas kerja, kesulitan koordinasi, dan gangguan lingkungan rumah yang dapat memengaruhi produktivitas pegawai (Mustajab et al., 2020).

Penerapan WFH pada instansi pemerintah juga berkaitan dengan perubahan sistem pengelolaan kinerja aparatur sipil negara. Penilaian kinerja pegawai tidak lagi hanya berorientasi pada kehadiran fisik di kantor, tetapi lebih menekankan pada pencapaian target kerja dan hasil pekerjaan yang diselesaikan secara efektif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan WFH mendorong perubahan budaya kerja birokrasi menuju sistem kerja yang lebih fleksibel, adaptif, dan berbasis teknologi informasi (Prasetyo & Sari, 2022).

## **2. Efisiensi Belanja Operasional**

Efisiensi belanja operasional merupakan upaya penggunaan anggaran secara tepat guna untuk memperoleh hasil kerja yang optimal dengan pengeluaran yang seminimal mungkin. Efisiensi dalam pengelolaan anggaran menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas penggunaan sumber daya pada instansi pemerintah. Belanja operasional instansi pemerintah umumnya meliputi biaya listrik, air, alat tulis kantor, konsumsi harian, pemeliharaan fasilitas, dan berbagai kebutuhan administrasi lainnya yang mendukung pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan publik. Pengelolaan belanja operasional yang efisien diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan tanpa menimbulkan pemborosan anggaran (Lona et al., 2023).

Penerapan *Work From Home* (WFH) memberikan pengaruh terhadap perubahan penggunaan anggaran operasional pada instansi pemerintah. Pengurangan aktivitas kerja di lingkungan kantor selama penerapan WFH menyebabkan beberapa komponen pengeluaran operasional mengalami penurunan. Penggunaan listrik, air, konsumsi kantor, serta kebutuhan alat tulis kantor menjadi lebih rendah dibandingkan sebelum penerapan sistem kerja jarak jauh. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan WFH dapat menjadi salah satu alternatif dalam mendukung efisiensi penggunaan anggaran operasional instansi pemerintah (Puspaningtyas & Endrayanto, 2023).

Meskipun demikian, efisiensi pengeluaran pada tingkat instansi tidak selalu menunjukkan efisiensi secara keseluruhan dalam pelaksanaan pekerjaan. Sebagian kebutuhan operasional kerja selama penerapan WFH berpindah menjadi tanggung jawab pribadi pegawai, seperti biaya internet, listrik rumah, dan perangkat kerja tambahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan WFH tidak hanya berdampak pada pengurangan pengeluaran instansi, tetapi juga menimbulkan

perubahan distribusi biaya operasional dari instansi menuju pengeluaran rumah tangga pegawai (Prasetyo, 2022).

### **3. Hambatan Teknis dalam Penerapan WFH**

Hambatan teknis dalam penerapan Work From Home (WFH) merupakan faktor yang berkaitan dengan keterbatasan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan pekerjaan secara jarak jauh. Hambatan tersebut meliputi ketidaktersediaan perangkat kerja seperti laptop, komputer, printer, serta keterbatasan jaringan internet dan paket data yang digunakan pegawai selama bekerja dari rumah. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan efektivitas koordinasi antarpegawai selama penerapan WFH (Napitu et al., 2022).

Hambatan teknis dalam penerapan WFH juga berkaitan dengan kualitas jaringan internet yang berbeda pada setiap wilayah tempat tinggal pegawai. Kondisi jaringan yang tidak stabil dapat menghambat pelaksanaan rapat daring, pengiriman dokumen digital, serta akses terhadap sistem administrasi instansi. Selain itu, keterbatasan alat pendukung kerja dan risiko keamanan data instansi menjadi tantangan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan sistem kerja jarak jauh. Perkembangan teknologi yang berlangsung secara cepat juga dapat menjadi kendala apabila pegawai belum mampu beradaptasi dengan penggunaan sistem digital secara optimal (Nugroho, 2024).

Hambatan teknis dalam penerapan WFH cenderung lebih kompleks pada instansi pemerintah yang memiliki karakteristik pekerjaan berbasis data teknis dan administrasi proyek, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Pelaksanaan pekerjaan pada instansi teknis membutuhkan akses terhadap basis data internal, dokumen proyek, serta sistem administrasi yang terintegrasi agar pekerjaan dapat berjalan secara efektif. Keterbatasan akses sistem dan infrastruktur digital selama penerapan WFH dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan kualitas pelayanan pada instansi pemerintah (Prasetyo, 2022).

## **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis dampak penerapan *Work From Home* (WFH) terhadap efisiensi belanja operasional dan berbagai kendala yang dihadapi pegawai selama pelaksanaannya. Penelitian dilaksanakan di Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025. Pengumpulan data primer dilakukan secara digital melalui teknik wawancara karena responden sedang menjalankan sistem kerja WFH. Responden penelitian berjumlah enam orang pegawai Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan keterlibatan mereka dalam pelaksanaan WFH.

Pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi wawancara terstruktur dan semi-terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan untuk memperoleh data yang konsisten sesuai fokus penelitian, sedangkan wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali pengalaman dan kendala responden secara lebih mendalam. Pedoman wawancara disusun berdasarkan aspek penguasaan teknologi, persepsi beban kerja, dan hambatan teknis selama penerapan WFH. Wawancara

dilakukan melalui media komunikasi digital resmi dengan melakukan verifikasi identitas responden melalui jabatan, unit kerja, dan status kepegawaian.

Data hasil wawancara kemudian ditranskripsi, diklasifikasikan berdasarkan tema penelitian, dan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Validasi data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap data sekunder berupa catatan tagihan utilitas kantor, seperti penggunaan listrik, air, dan kebutuhan operasional lainnya sebelum dan sesudah penerapan WFH. Proses analisis dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara responden dengan data riil pengeluaran operasional instansi untuk melihat perubahan efisiensi belanja operasional selama penerapan WFH.

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara terhadap pegawai Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan bahwa penerapan *Work From Home* (WFH) menimbulkan perubahan pada pola kerja dan penggunaan biaya operasional pegawai. Sebagian responden menyatakan bahwa pelaksanaan WFH memberikan dampak terhadap cara pelaksanaan pekerjaan karena sebagian aktivitas kerja dilakukan secara daring dari rumah. Responden juga menyampaikan bahwa pelaksanaan pekerjaan selama WFH sangat bergantung pada jaringan internet dan perangkat kerja pribadi yang digunakan di rumah. Selain itu, beberapa responden mengaku harus menyesuaikan pola kerja secara mandiri karena fasilitas kerja yang tersedia di rumah tidak selengkap fasilitas kantor.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasakan adanya pengurangan pengeluaran transportasi selama penerapan WFH. Responden seperti Isna, Putri Erwanda, dan Sopian menyatakan bahwa biaya bahan bakar kendaraan menjadi lebih rendah karena intensitas perjalanan menuju kantor berkurang. Salah satu responden menyampaikan bahwa “pengeluaran bensin jadi lebih hemat karena tidak setiap hari ke kantor.” Pengurangan mobilitas selama WFH menyebabkan beberapa pegawai merasa pengeluaran harian menjadi lebih ringan dibandingkan saat bekerja penuh di kantor.

Meskipun demikian, beberapa responden menyampaikan bahwa pelaksanaan pekerjaan selama WFH belum berjalan secara maksimal pada beberapa bagian administrasi. Responden Syahrudin yang bertugas pada bagian pengadministrasian perkantoran menyatakan bahwa proses kerja menjadi lebih lambat dibandingkan saat bekerja langsung di kantor. Salah satu kendala yang ditemukan adalah adanya kelalaian dalam pencatatan nomor surat keluar karena proses koordinasi dilakukan secara jarak jauh. Responden menyampaikan bahwa “kadang ada nomor surat yang terlupa dicatat karena koordinasi tidak langsung seperti di kantor.” Kondisi tersebut menunjukkan adanya kendala administrasi selama pelaksanaan WFH pada bagian pengelolaan surat dan dokumen kerja.

Hambatan teknis juga menjadi salah satu temuan utama dalam penelitian ini. Beberapa responden menyatakan bahwa pelaksanaan WFH sering terkendala oleh jaringan internet dan sistem kerja digital yang digunakan instansi. Responden Amir Syarifudin, S.E., menyampaikan bahwa aplikasi absensi digital terkadang sulit diakses sehingga pegawai mengalami kendala saat melakukan pengisian kehadiran

secara daring. Selain itu, beberapa responden juga menyampaikan adanya gangguan akses terhadap server data dan aplikasi administrasi instansi selama pelaksanaan WFH. Kendala tersebut menyebabkan proses pekerjaan dan pelaporan administrasi menjadi terhambat pada waktu tertentu.

Beberapa responden juga menyampaikan bahwa akses terhadap database dan server internal kantor menjadi kendala selama penerapan *Work From Home* (WFH). Responden Sopian menyatakan bahwa data administrasi dan dokumen teknis yang tersimpan pada server kantor tidak selalu dapat diakses dengan lancar dari luar kantor. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa pekerjaan administrasi menjadi terhambat karena pegawai harus menunggu akses data atau melakukan koordinasi tambahan dengan rekan kerja di kantor. Responden menyampaikan bahwa “kendala paling sering itu akses data di server kantor karena tidak semua file bisa dibuka dari rumah.” Temuan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan akses server internal menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan selama WFH di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur.

Beberapa responden juga menyampaikan bahwa penerapan WFH memberikan perubahan terhadap pembagian waktu antara pekerjaan dan aktivitas rumah tangga. Responden Syahrudin menyatakan bahwa pelaksanaan WFH memberikan lebih banyak waktu bersama keluarga karena pekerjaan dilakukan dari rumah. Akan tetapi, responden Lusi Wijayanti menyampaikan bahwa pelaksanaan pekerjaan dari rumah terkadang membuat pekerjaan kantor dan pekerjaan rumah tangga berlangsung secara bersamaan. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa pekerjaan harus diselesaikan secara bergantian selama pelaksanaan WFH.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa koordinasi kerja antarbagian mengalami beberapa kendala selama penerapan WFH. Responden Lusi Wijayanti menyampaikan bahwa proses verifikasi data dan koordinasi administrasi menjadi lebih sulit dilakukan secara jarak jauh dibandingkan saat bekerja langsung di kantor. Responden menyatakan bahwa “kadang koordinasi jadi lebih lama karena harus menunggu balasan pesan atau konfirmasi dari bagian lain.” Kendala tersebut menyebabkan beberapa proses administrasi dan verifikasi data memerlukan waktu yang lebih lama selama penerapan WFH.

Kendala jaringan internet juga menjadi salah satu hambatan yang sering dialami responden selama penerapan WFH. Responden Isna menyampaikan bahwa jaringan internet di rumah terkadang tidak stabil sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan dan pengiriman dokumen secara daring. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktu ketika jaringan internet mengalami gangguan. Selain itu, beberapa responden juga menyampaikan bahwa penggunaan internet pribadi menjadi lebih meningkat selama pelaksanaan WFH karena sebagian besar pekerjaan dilakukan melalui sistem digital dan komunikasi daring.

**Tabel 1. Perbandingan Realisasi Belanja Utilitas Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur Sebelum dan Sesudah Penerapan *Work From Home* (WFH)**

Periode	Status	Rata-rata Tagihan Listrik	Rata-rata Tagihan Air
Juni 2025 – Januari 2026	Sebelum WFH	Rp104.800.000	Rp13.600.000
Maret 2026	Sesudah WFH	Rp74.094.264	Rp7.204.651

Sumber: Data Sekunder Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur, 2026

Berdasarkan hasil dokumentasi data sekunder Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur, ditemukan adanya penurunan pada komponen belanja utilitas setelah penerapan *Work From Home* (WFH). Perbandingan data dilakukan dengan menghitung rata-rata tagihan listrik dan air pada periode sebelum WFH, yaitu Juni 2025 sampai Januari 2026, kemudian dibandingkan dengan tagihan utilitas pada bulan Maret 2026 sebagai periode awal penerapan WFH. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa rata-rata tagihan listrik mengalami penurunan dari Rp104.800.000 menjadi Rp74.094.264 atau sekitar 29%. Tagihan air juga mengalami penurunan dari Rp13.600.000 menjadi Rp7.204.651 atau sekitar 47%. Penurunan tersebut menunjukkan adanya pengurangan penggunaan fasilitas kantor selama penerapan WFH di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur.

#### **Pembahasan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Work From Home* (WFH) pada Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur memberikan pengaruh terhadap perubahan penggunaan belanja utilitas kantor dan pelaksanaan pekerjaan pegawai. Penurunan tagihan listrik dan air setelah penerapan WFH menunjukkan bahwa berkurangnya aktivitas kerja di kantor berdampak pada menurunnya penggunaan fasilitas operasional instansi. Kondisi tersebut sejalan dengan hasil wawancara responden yang menyatakan bahwa sebagian besar pekerjaan dilakukan dari rumah sehingga penggunaan fasilitas kantor menjadi lebih terbatas dibandingkan sebelum penerapan WFH.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa penerapan WFH memberikan dampak terhadap pengeluaran pribadi pegawai. Beberapa responden menyampaikan bahwa pengeluaran transportasi mengalami penurunan karena intensitas perjalanan menuju kantor berkurang selama WFH. Akan tetapi, sebagian responden juga menyatakan bahwa penggunaan listrik dan internet pribadi meningkat karena sebagian besar pekerjaan dilakukan secara daring dari rumah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan WFH tidak hanya memengaruhi pengeluaran operasional instansi, tetapi juga menyebabkan perubahan penggunaan biaya operasional pada tingkat individu pegawai.

Selain memengaruhi penggunaan biaya operasional, penerapan WFH juga menimbulkan beberapa hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan. Hambatan yang paling sering disampaikan responden berkaitan dengan jaringan internet, akses server data instansi, dan sistem administrasi digital. Responden menyampaikan bahwa gangguan jaringan internet dan kesulitan mengakses server kantor

menyebabkan beberapa pekerjaan administrasi dan pengelolaan dokumen menjadi lebih lambat dibandingkan saat bekerja langsung di kantor. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan WFH pada instansi teknis masih sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur digital yang digunakan instansi maupun pegawai.

Kendala lain yang ditemukan selama penerapan WFH berkaitan dengan proses koordinasi dan administrasi kerja. Beberapa responden menyampaikan bahwa koordinasi antarbagian menjadi lebih lambat karena komunikasi dilakukan secara daring dan tidak dapat dilakukan secara langsung seperti saat bekerja di kantor. Selain itu, proses administrasi seperti verifikasi data dan pencatatan surat juga memerlukan waktu lebih lama selama pelaksanaan WFH. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan sistem kerja dari tatap muka menuju sistem kerja daring memengaruhi kelancaran proses administrasi pada lingkungan Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur.

**Tabel 2. Hambatan Teknis dalam Penerapan *Work From Home* (WFH) pada Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur**

No	Kategori Hambatan	Temuan Penelitian	Dampak terhadap Pekerjaan
1.	Sistem Presensi Digital	Aplikasi absensi sulit diakses atau mengalami gangguan login	Pengisian kehadiran pegawai menjadi terhambat
2.	Akses Server Data	Server kantor tidak dapat diakses secara optimal dari luar jaringan kantor	Proses administrasi dan pengelolaan data menjadi lebih lambat
3.	Administrasi Surat	Terjadi kelalaian dalam pencatatan nomor surat keluar	Proses administrasi surat menjadi kurang tertib
	Jaringan Internet	Koneksi internet rumah tidak stabil saat pelaksanaan WFH	Pengiriman laporan dan koordinasi kerja menjadi terhambat
4.	Koordinasi Kerja	Verifikasi data antarbagian membutuhkan waktu lebih lama	Proses koordinasi administrasi menjadi lambat

Sumber: Hasil Wawancara Penelitian, 2026.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa hambatan teknis selama penerapan WFH terutama berkaitan dengan kesiapan sistem digital dan akses data pendukung pekerjaan. Kendala pada jaringan internet, sistem absensi digital, dan akses server data menjadi hambatan yang paling sering dialami responden selama pelaksanaan WFH. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem kerja jarak jauh pada instansi teknis memerlukan dukungan infrastruktur digital yang memadai agar pelaksanaan pekerjaan dan administrasi dapat berjalan secara efektif.

## **E. PENUTUP**

### **Simpulan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Work From Home (WFH) pada Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur memberikan dampak terhadap perubahan penggunaan biaya operasional dan pelaksanaan pekerjaan pegawai. Sebagian pegawai merasakan adanya penghematan biaya transportasi selama WFH karena berkurangnya aktivitas perjalanan menuju kantor. Akan tetapi, pelaksanaan WFH juga menimbulkan berbagai hambatan, terutama terkait jaringan internet, akses server data kantor, dan sistem administrasi digital yang belum berjalan secara optimal. Ketersediaan perangkat kerja dan kualitas jaringan internet di rumah menjadi faktor yang memengaruhi kelancaran pekerjaan pegawai selama WFH. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa meskipun penerapan WFH mampu menurunkan penggunaan utilitas kantor seperti listrik dan air, beberapa kendala teknis masih memengaruhi efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan proses administrasi di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan *Work From Home* (WFH) pada Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan dalam pelaksanaan sistem kerja di lingkungan instansi pemerintah, yaitu sebagai berikut:

1. Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur disarankan untuk meningkatkan kualitas sistem absensi digital dan memperbaiki akses server data agar pekerjaan administrasi dan teknis dapat berjalan lebih lancar selama penerapan *Work From Home* (WFH).
2. Instansi perlu mempertimbangkan pemberian dukungan fasilitas kerja, seperti bantuan kuota internet atau penyediaan perangkat kerja, untuk membantu pegawai yang mengalami keterbatasan sarana kerja di rumah.
3. Penerapan sistem kerja *hybrid* atau kombinasi kerja dari kantor dan rumah dapat menjadi alternatif yang lebih efektif untuk menjaga kelancaran koordinasi dan kualitas pekerjaan pada lingkungan Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Cahyarini, B. R., & Samsara, L. (2021). The Challenges of Digital Competency Implementation Towards World-Class Bureaucracy. *Jurnal Borneo Administrator*, 17(2), 259–274. <https://doi.org/10.24258/JBA.V17I2.825>
- Darmawan, E. (2020). *Kebijakan Work From Home bagi Aparatur Sipil Negara di Masa Pandemi Covid-19*. *TheJournalish: Social and Government*, 1(1), 92–99. <https://doi.org/10.55314/tsg.v1i3.26>
- Lona, S. S., Perseveranda, M. E., & Manafe, H. A. (2023). Analisis Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(1). <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1486>
- Mustajab, D., Bauw, A., Rasyid, A., Irawan, A., Akbar, M. A., & Hamid, M. A. (2020). *Working From Home Phenomenon As an Effort to Prevent*

- COVID-19 Attacks and Its Impacts on Work Productivity*. 4(1), 13–21.  
<https://doi.org/10.20473/TIJAB.V4.I1.2020.13-21>
- Nugroho, M. F. (2024). Examining The Impact of Various Factors on Working From Home. *Journal of Governance and Public Policy*, 11(2), 193–211. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v11i2.18190>
- Prasetyo, A., & Sari, M. D. P. (2022). Working From Home Policy for Indonesia's State Civil Apparatus: General Propositions. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i9.10933>
- Puspitaningtyas, R. A. R., & Endrayanto, N. (2023). Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Negara: Perubahan Cara Kerja dalam Rangka Peningkatan Kinerja Organisasi. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 7(1), 59–73. <https://doi.org/10.31092/jmkp.v7i1.2302>
- Rahmadani, S., Samsir, & Widayatsari, A. (2022). *Pengaruh Work From Home terhadap Kinerja Pegawai melalui Work Life Balance dan Work Stress di Satuan Kerja Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau pada Saat Pandemi Covid-19*. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 5(1).
- Sadhana, K., Kirana, R. N., & Wibowo, A. P. (2023). The Impact of Work from Home Policy for the State Civil Apparatus. *Journal of Transformative Governance and Social Justice*, 1(2), 103–113. <https://doi.org/10.26905/j-tragos.v1i2.10363>
- Sunardi, S. (2022). The Impact of Working from Home during a Pandemic Against Employee Performance (Exploratory Study). *JENIUS (Jurnal Ilmiah Manajemen Sumber Daya Manusia)*, 6(1), 42–42. <https://doi.org/10.32493/jjsdm.v6i1.20448>
- Wirasistha, S. S., & Widowati, A. (2023). Work from Home: Menuju Kinerja Aparatur Sipil Negara Yang Lebih Efisien. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*. <https://doi.org/10.33701/jiapd.v15i1.3614>
- Mousa, M., Arslan, A., Ullah, A., Tarba, S., & Cooper, C. (2024). Work from home feasibility and challenges for public sector employees in a developing country. *Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance*. Emerald Publishing. <https://doi.org/10.1108/JOEPP-12-2023-0549>
- Adomako, K., Agor, P. A., Terkper, D. T., Mensah, D. K. D., Akakposu, L. Y., & Dwomoh, A. Y. (2024). Impact of working from home on employee productivity in post COVID-19 era: The moderating role of organizational support. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 23(1), 340–358. <https://doi.org/10.30574/wjarr.2024.23.1.2022>
- Aksoy, C. G., Barrero, J. M., Bloom, N., Davis, S. J., Dolls, M., & Zarate, P. (2022). Working from Home Around the World. *Brookings Papers on Economic Activity*, Fall 2022, 281–360. <https://doi.org/10.3386/w30446>
- Barrero, J. M., Bloom, N., & Davis, S. J. (2023). The evolution of work from home. *Journal of Economic Perspectives*, 37(2), 37–62. <https://doi.org/10.1257/jep.37.2.37>